



JUKNIS KEMENKES PERLU DITINJAU ULANG

Di Yogya,

Jampersal Terserap Maksimal

YOGYA (KR) - Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kota Yogyakarta selama tahun 2011 terserap secara maksimal. Berdasar data di UPT Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah (JPKD) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, dana Rp 400 juta yang dikucurkan pemerintah pusat untuk Pemkot Yogyakarta, mampu terserap seluruhnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Tuty Setyowati, menuturkan tingginya tingkat serapan Jampersal karena bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. "Tidak hanya warga miskin saja, setiap ibu hamil bisa mendapatkan Jampersal," terangnya saat dikonfirmasi KR kemarin.

Kendati demikian, lanjut Tuty, pihaknya mengalami kendala teknis terkait upaya klaim pembayaran melalui program tersebut. Hal ini timbul karena ada perbedaan klaim antara petunjuk teknis (Juknis) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan perda yang dimiliki oleh Pemkot Yogyakarta. Yaitu, Perda No 3/2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Dalam perda tersebut, besaran klaim untuk biaya persalinan normal di puskesmas

sebesar Rp 523 ribu. Sementara dalam juknis hanya diatur sebesar Rp 350 ribu. "Sering kali memang di daerah yang memiliki perda, terdapat selisih dengan juknisnya," ungkap Tuty.

Oleh karena itu, Pemkot Yogyakarta telah mengajukan usulan kepada Kemenkes supaya melakukan tinjauan terhadap juknis tersebut. Dijanjikan, awal tahun 2012, Kemenkes akan merevisi juknis bagi daerah yang sudah memiliki perda.

Meski mengalami selisih, Pemkot sudah memberikan antisipasi dengan menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal). Dalam perda terdapat klausul jika pengurangan serta pembebasan jaminan kesehatan bisa diatur dalam perwal.

"Untuk di Pemkot sudah diakomodir dengan perwal sehingga tidak masalah. Tapi, supaya lebih menjangkau, maka juknis memang perlu ditinjau ulang," paparnya.

Mekanisme pemberian Jampersal tahun ini juga tidak berbeda dengan sebelumnya. Ibu hamil cukup melakukan pemeriksaan di puskesmas terdekat. Jika dinyatakan dapat melahirkan dengan normal, maka pers-

Dihaturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris
4. Asisten

Tempusan Ke

Sedangkan ibu hamil dengan tingkat kesulitan tinggi akan dirujuk ke rumah sakit yang sudah bekerja sama.

Hanya saja, pasien akan ditempatkan di kelas III dengan nilai klaim sesuai juknis sebesar Rp 1,2 juta.

(M-6)-f

Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
Netral	Segera	Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005